

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

HKBP merupakan organisasi gereja yang berdiri sebagai buah dari upaya *Zending Reinische Mission Gescelschaft* (RMG) pada tanggal 7 Oktober 1861. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, daerah Tapanuli yang beribukota di Tarutung menjadi pusat pemerintahan dan penyebaran agama Kristen. Kehidupan masyarakat Matiti sebelum masuknya kekristenan masih kental dengan *hasipelebeguan* (menyembah roh) hingga pada tahun 1904 Nommensen mengutus rekannya sesama missionaris, Pdt. Herling untuk menyebarkan agama di wilayah Doloksanggul. Setelah rumah-rumah penduduk dibakar oleh Belanda dan menyerahnya *Jaihatan* Raja Cornelis Simanullang, agama Kristen mulai diterima di Desa Matiti. Pendeta Herling berperan sebagai guru pengajar di Desa Matiti. Selama 2 tahun penduduk Matiti belajar injil, hingga pada 15 Desember 1907 berdiri gereja HKBP Simanullang dengan dibaptisnya 34 orang penduduk Desa Matiti menjadi Kristen dan 2 orang diangkat menjadi penatua. Pada tahun 1956, HKBP Simanullang, berdiri sebagai Ressort. Pada tahun 2022, jumlah jemaat di HKBP Ressort Simanullang berjumlah 4.394 jemaat dengan 7 gereja Pagaran.

Sebelum konflik HKBP terjadi, kehidupan masyarakat Desa Matiti hidup berdampingan dengan menjaga aturan dan hukum *Dalihan Natolu*. Berdasarkan *Dalihan Natolu*, keluarga memperlai laki-laki harus menghormati keluarga mempelai perempuan (*somba marhula-hula*), bersikap hati-hati terhadap sesama

marga (*manat mardongantubu*), dan membujuk dengan lemah lembut anak perempuan (*elek marboru*).

Konflik HKBP disebut sebagai Krisis karena pejabat elit HKBP dan jemaat HKBP tidak dapat memegang teguh prinsipnya sebagaimana tertuang dalam Aturan dan Peraturan HKBP serta berkaitan dengan keinginan-keinginan duniawi, sedangkan pemerintah menyebut Konflik HKBP sebagai Kemelut karena dianggap sebagai situasi yang membahayakan dan mengganggu keamanan. Adapun yang menjadi faktor-faktor terjadinya konflik HKBP di Desa Matiti adalah 1) Perebutan Jabatan Ephorus oleh pejabat elit HKBP, 2) Kegagalan Sinode Godang ke-51 tahun 1992, dan 3) campur tangan pemerintah dan pihak luar dalam konflik HKBP.

Konflik kepemimpinan berupa perebutan kekuasaan sudah terjadi dalam HKBP bahkan sebelum diselenggarakannya Sinode Agung ke-51. Konflik bermula dari adanya isu yang mengatakan bahwa Pdt. S.A.E. Nababan melakukan kecurangan dalam pemilihan Ephorus dengan melakukan suap kepada peserta sinode. Dugaan tersebut muncul dengan adanya kelompok *par-ritrit* yang merupakan pendukung Ds. P.M. Sihombing yang sebelumnya telah digadagadag akan terpilih menjadi Ephorus. Perebutan kekuasaan yaitu jabatan Ephorus dapat dimaklumi karena Ephorus merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi HKBP (*hatopan*). Seorang Ephorus menerima gaji dan fasilitas yang lebih besar dibandingkan dengan palayan-palayan HKBP Lainnya, selain itu HKBP memiliki dana yang mencapai angka miliaran setiap tahunnya yang bersumber dari *durung-durung* (kolekte). Kolekte tersebut berasal dari seluruh

jemaat HKBP setiap minggunya dan hal tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab ephorus. Penghasilan yang didapatkan ephorus diperoleh dari *sipalas roha* dan bahkan setelah pensiun seorang ephorus juga memperoleh dana pensiun dan fasilitas yang lebih besar dibandingkan dengan gaji pendeta aktif.

Pada tahun 1992 telah direncanakan pelaksanaan Sinode Godang dan telah dibentuk Panitia Sidang Sinode Godang, namun ternyata sekjen juga membentuk panitia lainnya, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi sebelum sidang sinode dilaksanakan. Pada saat pembukaan Sinode Godang ke-51, Seminarium HKBP Sipoholon, sudah dikelilingi oleh angkatan bersenjata dan mengambil alih tugas dan fungsi panitia penyelenggara. Selama berlangsungnya sidang sinode, terjadi interupsi dari berbagai arah, sementara pihak keamanan tidak bergerak sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan pembicaraan menjadi tidak terarah sehingga Pdt. S.A.E. Nababan menskors Sinode.

Konflik HKBP terjadi pada tahun 1992-1998, pada masa pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan gaya pemerintahan yang otoriter dan diktator. Intervensi pemerintah terhadap HKBP telah terjadi sebelum Sinode Godang 1992, yaitu adanya pembentukan tim damai yang disponsori oleh Maraden Panggabean dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat tuntutan dari kelompok *Par-ritrit*. Kemudian intervensi pemerintah dalam konflik HKBP diminta oleh Pdt. O.P.T Simorangkir melalui keterangan pers dan surat-surat resmi. Intervensi pemerintah semakin terlihat dengan dikeluarkannya SK Bakorstanasda tentang pengangkatan Pejabat Ephorus untuk melaksanakan Sinode Godang Istimewa. Melalui pelaksanaan Sinode Agung Istimewa (SAI) di Hotel Tiara Medan pada

tanggal 11-12 Februari 193 Pdt. Dr. P.W.T. Simanjuntak terpilih sebagai ephorus dan Pdt. S.M. Siahaan sebagai sekjen. Hal tersebut mengakibatkan jemaat HKBP terpecah menjadi dua kelompok karena terjadi dualisme kepemimpinan ephorus HKBP. Kelompok yang pro terhadap Ephorus Nababan menyebut diri mereka sebagai kelompok AP/SSA sedangkan kelompok yang pro terhadap Ephorus Simanjuntak disebut dengan kelompok SAI.

Pada tahun 1992, gereja HKBP Simanullang mengirimkan Pdt. B. Manalu bersama Guru Jemaat St. Gani Simanullang dan Togar Manullang menjadi peserta Sinode di Seminari Sipoholon. Setelah Ephorus Simanjuntak terpilih, jemaat di HKBP Simanullang terpecah menjadi dua, yaitu kelompok AP/SSA dan kelompok SAI. Pada awal konflik, pelaksanaan Ibadah di gereja dilakukan secara bergiliran, namun sering terjadi keributan dikarenakan salah satu kelompok sering mengulur waktu menyelesaikan ibadah sehingga kondisi menjadi tidak kondusif. Setelah Pdt. B. Manalu dipindahtugaskan, Pdt. Eddy Simanullang ditempatkan di gereja HKBP Simanullang. Namun, kelompok satuan Kodim 0210/ TU, yaitu Koramil 05/DS dan Koramil 22/Tarutung datang ke gereja HKBP Simanullang dan pengukuhan Pdt. Eddy Simanullang dilakukan oleh aparat militer. Hal tersebut mengakibatkan kelompok SAI meninggalkan gereja dan membuka tempat peribadahan sementara di rumah St. Miliater Simanullang di Lumban Hariara. Sementara kelompok SAI menempati gereja.

Selama satu tahun, kelompok pendukung ephorus Nababan semakin banyak sehingga pada tahun 1995, kelompok AP/SSA membuka *parlape-lapean* di Lumban Julu dengan dilayani Pdt. Nelson Siregar. Pada tahun 1996, Pdt.

S.A.E. Nababan melakukan kunjungan ke Desa Matiti dan menyampaikan kotbah untuk meneguhkan iman kelompok AP/SSA dalam krisis HKBP. Selama di *parlape-lapean* kelompok AP/SSA beberapa kali mengirimkan surat kepada kelompok SAI untuk melakukan perundingan, namun tidak mendapatkan respon dari kelompok SAI. Akhirnya, pada tahun 1996, kelompok AP/SSA merebut gereja sehingga terjadi kekerasan, yaitu dengan pembongkaran pintu-pintu dan jendela-jendela gereja untuk memasuki gereja. Selain itu, terjadi kekerasan antara aparat militer dengan kelompok AP/SSA guna mengagalkan usaha kelompok tersebut memasuki gereja, sementara kelompok SAI diamankan di rumah gereja. Kelompok AP/SSA pada akhirnya berhasil memasuki gereja karena jumlah mereka lebih banyak. Sementara, kelompok SAI membuka tempat peribadahan sementara di rumah St. Jeferson Munte hingga kemudian gereja baru dibangun di atas tanah pemberian jemaat, Tiamar Simanullang, hingga pada tahun 1998 berdiri gereja HKBP Immanuel Matiti.

Pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim orde baru, maka diadakan Sinode Godang Rekonsiliasi sebagai langkah awal dalam mengakhiri konflik HKBP. Gereja HKBP Simanullang mengirimkan St. Marhakim Samosir sebagai perwakilan, sedangkan Gereja HKBP Immanuel Matiti mengirimkan St. Justin Lumban Gaol. Melalui Sinode Godang 1998 Pdt. J.R. Hutauruk terpilih sebagai Ephorus dan Pdt. Williem T.P Simarmata sebagai Sekjen. Sinode tersebut merekomendasikan penyatuan kembali jemaat dan pemekaran gereja atas kesepakatan bersama. Dengan dilaksanakannya sinode 1998, maka berakhirilah

konflik HKBP dan berangsur-angsur berakhir di daerah-daerah, termasuk di Desa Matiti.

Adapun dampak yang diakibatkan konflik HKBP 1992-1998 di Desa Matiti adalah 1) berdirinya gereja baru, yaitu gereja HKBP Immanuel dan berdirinya resot Immanuel Hutagurgur, hal ini merupakan dampak positif sebagai wujud perluasan pelayanan HKBP di Desa Matiti. 2) Munculnya kekerasan yang timbul akibat pembongkaran pintu-pintu dan jendela-jendela gereja pada saat ibadah masih dilakukan secara bergiliran, selain itu kekerasan juga terjadi antara aparat militer dan jemaat AP/SSA ketika kelompok AP/SSA berusaha merebut gereja. 3) Rusaknya sistem kekerabatan jemaat HKBP di Desa Matiti yang meninggalkan luka batin akibat sakit hati dan kepahitan selama berlangsungnya konflik. 4) Hilangnya arsip-arsip gereja berupa buku *bolon* dan buku sejarah gereja HKBP Simanullang.

5.2 Saran

Penulis berharap penelitian ini dapat memperluas pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat yang merupakan jemaat HKBP di Desa Matiti mengenai sejarah berdirinya gereja HKBP di Desa Matiti dan peristiwa krisis HKBP di Desa Matiti.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi jemaat HKBP sehingga dapat memegang visi, misi, dan prinsip HKBP supaya menjadi wadah bagi jemaat HKBP sendiri untuk bertumbuh di dalam Kristus dan HKBP tumbuh menjadi berkat bagi dunia.

Semoga penelitian ini juga bermanfaat dan menjadi referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya. Untuk melanjutkan hal-hal yang masih kurang dalam penelitian ini mengenai sejarah berdirinya gereja HKBP di Desa Matiti.



THE
Character Building
UNIVERSITY